

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Asshiddiqie, Jimly, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- \_\_\_\_\_, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Axline, Michael D., *Environmental Citizen Suits*, (New Hampshire: Butterworth Legal Publishers, 1991)
- Basah, Sjachran, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997).
- \_\_\_\_\_, *Eksistensi dan Peranan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2005).
- Dianta, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenandamedia Group, 2016).
- Gokkel, H.R.W. dan N.S. Adiwinata, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1983).
- Gokkel, H.R.W. dan N. Van Der Wal, *Juridisch Latijn*, (Alphen aan den Rijn: Tjeenk Willink, 1996)
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

- Hadjon, Philipus M., dkk., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010).
- Harahap, Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004).
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Lingkungan di Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2025)
- Salim, Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1986).
- Siahaan, Lintong O., *Proses Berperkara di PTUN*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006).
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Tjandra, W. Riawan, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018).

Wibisana, Andri G., *Penegakan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata*, (Depok: BP-FHUI, 2017).

Jurnal / Artikel

Bimasakti, Muhammad Adiguna, “Merekonstruksi Paradigma Gugatan Citizen Lawsuit di Indonesia sebagai Sengketa Administrasi,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 1, 2020.

Hidayat, Arif, “Citizen Lawsuit sebagai Mekanisme Penegakan Hukum Lingkungan oleh Masyarakat,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, 2021.

Panggabean, M. J., Putrijanti, A., & Leonard, L. T. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Warga Negara (*Citizen Law Suit*) Terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. *Diponegoro Law Journal*, 10(2).

Niken, Y. (2023). Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) dan Justiciability. *Jurnal Kertha Patrika*.

Simanjuntak, Enrico Parulian, “Perkara Advokasi Publik Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP),” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 1, 2018.

\_\_\_\_\_, “Perkembangan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca UU Administrasi Pemerintahan,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3, 2018.

Tektona, Rahmadi Indra, "Citizen Lawsuit sebagai Instrumen Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 1, 2016.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, "Peradilan," dalam *KBBI VI Daring*, diakses 27 Februari 2026, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peradilan>

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang

Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor

039/G.PLW/2017/PTUN.Smg.